

**PELAKSANAAN KERJASAMA URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KB
ANTARA INSTANSI VERTIKAL DENGAN DINAS DAERAH DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2014-2015**

Resy Fikriyandi
Email: resyfikri.sutedjha123@gmail.com

Drs. H. Isril, MH

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstract

BPPMKB Pekanbaru City as a technical institution in the Region which has authority in carrying out the implementation of KB affairs contained in Regional Regulation of Pekanbaru City Number 3 Year 2008 About Government Affairs which become the Authority of Pekanbaru City Government. Article 2 explained that in carrying out Regional autonomy, the Regional Government to carry out Government affairs which become the authority of the Region such as the affairs of Family Planning and Family Welfare which is the obligatory business of Pekanbaru City Government.

The results of this research is in the implementation of the Government in the Family Planning Division between vertical agencies and the Regional Office in Pekanbaru City consists of the Cooperation of Population Control in Pekanbaru City, Cooperation of Provision of Family Planning Facilities in Pekanbaru City, Cooperation in Contraception and Family Planning Service in Pekanbaru City, Cooperation in the development of facilities Center for Information and Counseling, Adolescent Reproductive Health in Pekanbaru City, Cooperation Socialization, Communication, Information and Education (KIE) Youth Reproductive Health (KRR) in Pekanbaru City, and Cooperation in Development of Toddlers in Pekanbaru City. Obstacles implementation of Government cooperation in the field of KB Between the vertical agency with the Regional Office in Pekanbaru City consists of the lack of Coordination between the BKKBN Representative of Riau Province with BPPMKB Pekanbaru City in the implementation of family planning, Lack of Employee Ability in disseminating about the implementation of family planning in Subdistrict in Pekanbaru, minimum Facilities Sarana And Infrastructure supporting in organizatioan KB, Lack of Information from Representative BKKBN Riau Province to BPPMKB Pekanbaru City.

Keywords: *Implementation, Cooperation KB field, vertical agency, Regional Office*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah membawa dampak besar bagi pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Program KB yang pada awalnya secara struktural dikoordinasikan oleh BKKBN, pada saat otonomi dilimpahkan kepada daerah. Kabupaten/kota menyikapi aturan ini secara beragam. Ada banyak variasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyikapi pelaksanaan program KB. Sebagian besar menganggap bahwa KB bukan persoalan yang masuk skala prioritas karena dianggap bukan sektor strategis. Sebaliknya, program tersebut dianggap sektor yang banyak menghabiskan anggaran.

Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten/ Kota perlu dilaksanakannya kerjasama yang baik agar terwujudnya konsistensi kebijakan nasional, provinsi, kabupaten/ kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;
2. Meningkatkan Kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan

melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau yang merupakan organisasi vertikal pemerintah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar,

dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.

- c. Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau.
- d. Penyelenggaraan Komunikasi, informasi, dan edukasi, dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran KB di Provinsi Riau.
- e. Penyelenggaran pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran keluarga berencana di Provinsi Riau.
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran KB di Provinsi Riau.
- g. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau.
- h. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
- i. Pengolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
- k. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan dibidang pengendalian dan penyelenggaran KB ke Kantor Pusat BKKBN.

BPPMKB sebagai SKPD KB di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru dibentuk pada tanggal 31 Juli 2008 yang mana nomenkelaturnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kedudukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Akibatnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017 tidak mencantumkan program KB sebagai program prioritas yang menjadi program kerja BPPMKB Kota Pekanbaru sehingga beberapa kegiatan Keluarga Berencana hasilnya kurang optimal dalam penurunan fertilitas, dan tercantum dalam indikator kinerja tahun 2013-2015 pada program keluarga berencana belum akomodir semua *point-point* yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Huruf (n) tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana untuk pemerintah Kabupaten/ Kota.

BPPMKB Kota Pekanbaru sebagai lembaga teknis di Daerah

yang memiliki kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan urusan KB yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasal 2 dijelaskan bahwa dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diantaranya adalah bidang urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Kerjasama Urusan Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru tahun 2014-2015”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian di dilakukan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru sebagai organisasi Pemerintah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan keluarga Berencana (KB).

PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru

a. Kerjasama Pengendalian Penduduk di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.530.311 jiwa sesuai hasil Sensus Penduduk tahun 2010

lalu, tingkat laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau termasuk tinggi yaitu 3,59 persen/tahun, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 1,49 persen/tahun. Kondisi ini antara lain disebabkan karena masih tingginya angka kelahiran, menurunnya angka kematian dan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Riau.

Pentingnya pengendalian jumlah penduduk yang selain di sebabkan banyaknya pendatang di pekanbaru juga disebabkan dari tingginya tingkat kelahiran bayi di Kota Pekanbaru. Sehingga menjadikan pertumbuhan jumlah penduduk kota Pekanbaru termasuk terbesar di Indonesia.

Warga pendatang yang menetap di Kota tidak melaporkan kepindahannya, termasuk ke RT/RW, dan lurah setempat. Sehingga menyebabkan jumlah penduduk Pekanbaru Pekanbaru tercatat sebanyak 1,1 juta jiwa. Dimanal di tahun 2013 lalu hanya tercatat sebanyak 975.304 jiwa, dan tahun 2014 menjadi 1.0546.916 jiwa.

b. Kerjasama Penyediaan Fasilitas KB di Kota Pekanbaru

Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dalam rangka percepatan Revitalisasi Program KB Nasional di Kota Pekanbaru, mengingat angka pertumbuhan penduduk di Pekanbaru yang cukup pesat sekitar 4,3 persen pertahun, tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut tentu bukan karena program KB

tidak berhasil tetapi lebih disebabkan oleh jumlah penduduk pendatang yang cukup tinggi ke kota pekanbaru. Penyediaan fasilitas dalam penyelenggaraan KB merupakan hal terpenting bagi pelaksanaann kerjasama yang dilakukan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru.

Fasilitas pelayanan KB di Kota pekanbaru cukup memadai, meskipun luas Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Akan tetapi BPPMKB Kota Pekanbaru telah melakukan upaya strategis dengan mengusulkan peneambahan fasilitas tersebut terutama kendaraan bermotor mengingat Kota Pekanbaru memiliki 58 Kelurahan. Untuk diketahui bahwa penggunaan fasilitas pelayanan program Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru.

c. Kerjasama dalam Pelayan Kontrasepsi dan KB di Kota Pekanbaru

Dalam program Keluarga Berncana dengan kegiatan penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan alokasi anggaran Rp. 69.535.400,-sesuai dengan evaluasi keuangan, telah dapat direalisasikan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 33.422.249,- yaitu fisik 100% dengan keuangan 79,48%.

Dalam Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru

terdapat 3 (tiga) program pokok dari Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dalam pelayanan ini biaya pelayanan program Keluarga Berencana dibiayai oleh Pemerintah yaitu bersumber APBD dan APBN. Anggaran tersebut untuk pengadaan alat karna memang merupakan tanggung jawab dari BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk pengadaan Alat dan obat kontrasepsi. Namun untuk pelayanannya dilakukan oleh BPPMKB Kota Pekanbaru. Kerjasama di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru terlihat dari pertemuan PLKB/PKB se-Kota Pekanbaru dengan Deputi KBKR BKKBN Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengendalian penduduk melalui kerjasama dalam Pelayan Kontrasepsi dan KB di Kota Pekanbaru. Mengingat pekanbaru merupakan Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebesar 1.427 jiwa/km².

d. Kerjasama dalam pengembangan sarana Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja di Kota Pekanbaru

Dalam Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru bekerjasama

untuk memperkenalkan keberadaan PIK-KRR kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka memperluas akses dan pengembangan dukungan dan jaringan PIK-KRR dan bekerjasama sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Camat dan Lurah di Kota Pekanbaru. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi program keluarga berencana dan sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan kepada BKKBN Provinsi Riau, sehingga terjadi hubungan komunikasi timbal balik (*two ways communication*) antara Perwakilan BKKBN dengan masyarakat untuk saling pengertian.

Masalah kewenangan itu harus dituangkan ke dalam APBD. Untuk itu hal tersebut dibahas semua dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan KB, hal ini bertujuan untuk melihat kewenangan yang tersedia di APBN, dan kewenangan yang tersedia APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, hal ini dilakukan untuk meningkatkan angka peserta KB di wilayah Riau, untuk itu sosialisasi dan informasi tentang KB itu dapat disampaikan kepada masyarakat dengan selengkap-lengkapunya.

Capaian/Realisasi

Keuangan sasaran Strategis Bidang Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru adalah dengan target Rp. 1.038.024.170 dan yang telah terealisasi adalah Rp. 933.311.772 sekitar 89,91%. Penggunaan anggaran untuk program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Rp. 123.795.185 dan yang terealisasi adalah Rp. 100.687.600 atau sekitar 81,33%. Anggaran BPPMKB Kota Pekanbaru berasal dari APBD Kota Pekanbaru, hal inilah yang membedakan dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang anggarannya bersumber dari APBN/Pusat. Pagu anggaran yang tersedia dalam capaian kinerja keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 44.594.346.483 yang dapat terealisasi hingga berakhirnya tahun 2015 adalah sebesar Rp. 35.623.588.483 atau 79,88%. Keterbatasan dalam penyediaan dana, sarana dan prasana bagi pelaksanaan operasional program KB ditingkat Kabupaten/Kota dan Daerah-daerah yang ada di Riau yang sulit dijangkau.

e. **Kerjasama Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di Kota Pekanbaru**

Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana kepada Pelajar /Remaja dan masyarakat

Pekanbaru yakni dengan tatap muka langsung dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dengan bersama-sama unsur-unsur dari masyarakat, Perwakilan BKKBN mulai memberikan pemahaman tentang program Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru termasuk juga maksud dan tujuannya. Disamping itu Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru juga telah menjalin hubungan atau kerjasama dengan media, baik media cetak maupun elektronik dalam rangka mensosialisasikan program KB. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mengetahui tentang arti KB, manfaat KB, penggunaan dan pemilihan alat kontrasepsi yang cocok, sehingga pencapaian target BKKBN setiap bulan terus meningkat.

f. Kerjasama dalam Pembinaan Keluarga Balita di Kota Pekanbaru

BPPMKB Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dalam pembinaan Keluarga Balita di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mengalami perkembangan stagnan. Pasalnya, berdasarkan hasil SDKI 2002/2003, SDKI 2007 tahun, *total fertility rate* (TFR) adalah 2,6 anak per wanita usia subur. Sementara untuk Riau mengalami peningkatan 2,7 anak

per wanita usia subur pada SDKI 2012. Angka ini tentunya merupakan lampu kuning pada program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Riau.

3.2. Hambatan pelaksanaan Pelaksanaan Kerjasama urusan Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru

a. Kurangnya Koordinasi Antara Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan BPPMKB Kota Pekanbaru

Rendahnya Koordinasi Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dan dapat pahami bahwa kerjasama yang dilakukan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru belum maksimal dalam pelayan publik.

Selain itu Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru masih belum memaksimalkan sosialisasi lanjutan dari program yang dijalankan bersama, dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami program tersebut, cakupan pelayanan yang diberikan oleh Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru sudah berjalan namun belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan karena terbatasnya dukungan dari

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Terutama dalam program atau kegiatan yang berkaitan dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru.

b. Kurangnya Kemampuan Pegawai BPPMKB Kota Pekanbaru

Dalam upaya pelaksanaan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan oleh, kurangnya kemampuan dalam mengemban dan menjalankan tugas. Hal ini sangat berkaitan erat dengan proses untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Pekanbaru, bertolak dari hal itu dapat dijadikan suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan penduduk. Pelayanan yang di berikan oleh BPPMKB Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan KB masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya atau dampak dari pernikahan yang tidak terencana dengan baik.

Untuk mengatasi hal tersebut kemampuan pegawai dalam kerjasama yang melibatkan Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan KB harus ditingkatkan terutama kemampuan tenaga penyuluh KB yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk diketahui bahwa jumlah tenaga penyuluh Keluarga

Berencana ditingkat lini lapangan atau kelurahan belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya dan saat ini semakin berkurang (Rasionya tidak sesuai dengan jumlah Kelurahan yang ada) seharusnya 58 orang untuk 58 Kelurahan, sedangkan pada saat ini PKB sebanyak 28 orang untuk 58 Kelurahan.

Selain penambahan jumlah PKB yang memiliki kompetensi dibidangnya, BPPMKB Kota Pekanbaru juga dituntut untuk melakukan pembinaan dari pegawai Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru, sehingga dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Pekanbaru dapat berjalan secara maksimal dan mampu menekan jumlah kelahiran yang tinggi di Pekanbaru terutama di Kecamatan-kecamatan pinggir di Kota Pekanbaru.

c. Fasilitas Sarana dan Prasarana BPPMKB Kota Pekanbaru

Meskipun dalam bekerjasama antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan KB, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, kerjasama yang diajalkan juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada

kebutuhan kebijakan, ruang kantor, komputer, dll.

Pada dasarnya fasilitas sangat penting sebagai salah satu upaya menghimpun, mengatur, memelihara, dan mengendalikan alat, benda, uang, waktu dan metode kerja serta peralatan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha kerjasama antara Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru. Fasilitas memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru yang merupakan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang mempunyai tujuan utama untuk mengendalikan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru dengan cara memperkuat kerjasama kelembagaan antar Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan KB. Apabila melihat beban tugas dari Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru masih banyak peralatan yang masih terbatas. Hasil yang diperoleh di lapangan

menunjukkan data dan informasi sebagai berikut:

1. Sarana komputer yang dimiliki hanya berjumlah 2 buah dan printer 1 buah dengan perincian hanya 1 yang dapat digunakan secara normal sedangkan 1 buah dalam keadaan sering rusak bila digunakan. BPPMKB Kota Pekanbaru tentu saja hal tersebut sangatlah belum memadai.
 2. Sarana transportasi/kendaraan dinas yang masih sangat kurang, terutama untuk menunjang pelaksanaan pendataan, dan pengawasan terhadap masyarakat. Sampai saat ini BPPMKB Kota Pekanbaru hanya memiliki 16 unit motor dinas dan 4 unit mobil. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu dari faktor kelemahan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru. Jadi keterbatasan sarana prasarana yang tidak termanfaatkan oleh pegawai dirasakan cukup menghambat dalam melaksanakan tugas-tugas yang secara langsung tentunya juga tugas-tugas yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru.
- d. Kurangnya Informasi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Riau kepada BPPMKB Kota Pekanbaru**

Kelancaran informasi dari Pemerintah di Bidang KB antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru merupakan hal yang sangat penting mengingat dalam penyelenggaraan KB sangat dibutuhkan informasi yang *update*. Permasalahan dalam informasi ini menjadi problem yang sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan program yang di jalankan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau belum terlaksana secara maksimal, karena dari ketujuh program BKKBN ada satu program BKKBN yakni program PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pernikahan di usia muda yang terjadi dikalangan masyarakat belum mendapatkan pemahaman secara maksimal tentang pernikahan yang dilakukan secara dini karena banyak faktor yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda seperti pemahaman dalam membina keluarga dan hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru terdiri dari Kerjasama pengendalian Penduduk di Kota Pekanbaru,

Kerjasama Penyediaan Fasilitas KB di Kota Pekanbaru, Kerjasama dalam Pelayan Kontrasepsi dan KB di Kota Pekanbaru, Kerjasama dalam pengembangan sarana Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja di Kota Pekanbaru, Kerjasama Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di Kota Pekanbaru, dan Kerjasama dalam Pembinaan Keluarga Balita di Kota Pekanbaru.

Hambatan dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaran KB terdiri dari kurangnya Koordinasi antara Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan BPPMKB Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan KB, kurangnya kemampuan pegawai BPPMKB Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan mengenai penyelenggaraan KB di Kecamatan Pinggiran di Kota Pekanbaru, Minimnya Fasilitas Sarana dan Prasarana pendukung BPPMKB Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan KB, Kurangnya Informasi dari Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru sehingga dampak yang dirasakan adalah pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru masih sangat rendah mengenai Keluarga Berencana (KB).

b. Saran

Kerjasama Pemerintah di Bidang KB antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota

Pekanbaru hendaknya lebih meningkatkan Koordinasi, sehingga berbagai permasalahan tentang penyelenggaraan KB dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu peningkatan kemampuan pegawai atau staff perlu di tingkatkan misalnya seperti pembinaan pegawai dan peningkatan pemahaman pegawai dalam penyelenggaraan KB sehingga pelaksana dapat memahami Tupoksi mereka masing-masing, penambahan fasilitas sarana dan prasarana penting untuk dilakukan mengingat sarana merupakan unsur penting dalam mewujudkan kebijakan. Serta penyampaian informasi sangat penting dilakukan antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ananta Aris. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.
- Ananta, Aris. 1995. *Transisi Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: UI
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press.
- Darwin, Muhadjir. 2000, *Aspek kemanusiaan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk*, Jakarta : Aditya Media.
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faturochman dkk. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universita Gajah Mada.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha, Konsep dan Strategi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hamdi, Muchlis, dkk. 2007. *Kebijakan Publik : Selayang Pandang*. Widya Praja Edisi ke 33. Jakarta : IIP Depdagri.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press Kartomo.
- Keban, Jeremias T. 2007. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Lembaga Demografi. 2007. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Malthus. 2007. *Kependudukan, Dilema dan Solusi*. Bandung : Nuansa.
- Mantra Bagoes Ida. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mentra, Ida Bagus. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Grasindo.
- Nyoman, Adika dan Abdul, Haris. 2002. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Pamudji. S. 1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka*

- Pembinaan Wilayah*. Bina Aksara : Jakarta
- Rahma, Merita. *Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pelaksanaan Program Kb Dinamis/Tim Kb Keliling (Analisis Terhadap Implementasi Program KB Dinamis/TKBK Di Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Siswanto, Sunarno. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1985. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Wirosuhardjo. 1981. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI.
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumber Aturan Perundang-undang:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
- PP No. 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
- PP No.62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/Per/B5/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Dan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- Renstra Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Perwakilan Provinsi Riau 2010-2014.
- Renstra Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Perwakilan Provinsi Riau 2014-2015.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru
- LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2014.
- LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015.

LAKIP BPPMKB Kota Pekanbaru
2015

Sumber Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk diakses tanggal 12 September 2016 pukul 22.00 WIB

www.bkkbn.go.id/arsip/.../Sejarah%20BKKBN.pdf

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/09/23/angka-pertumbuhan-penduduk-di-pekanbaru-banyak-disumbangkan-pendatang> diakses tanggal 12 September 2016

<http://www.antarariau.com/berita/55179/disdukcapil:-laju-pertumbuhan-penduduk-pekanbaru-7,43-persen> diakses tanggal 12 September 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk diakses pada tanggal 13 September 2016.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_penduduk.

<http://cake507.blogspot.com/2012/09/makalah-kerjasama.html>, diakses pada Oktober 2016.